ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA PANDEMI

Sanniati Muddin^{1*}, Mardiana², Yuspiani³, Musdalifah⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia^{1*234}

Email: sanniati.111@gmail.com^{1*}, anamardi454@gmail.com², yuspiani@uin-alauddin.ac.id³,
gaffarmusdalifah@gmail.com⁴

Keywords

*Education Policy,
COVID-19
Pandemic,
Distance Learning,
Digital Divide*

Abstrak

The COVID-19 pandemic has forced governments around the world, including Indonesia, to implement emergency policies in the education sector. This study analyzes the education policies implemented during the pandemic, evaluates their effectiveness, and assesses their impact on the learning process and educational inequality. Using a descriptive qualitative approach and literature review, the results of the study show that distance learning (DL) policies faced various challenges such as limited infrastructure, digital divide, and the quality of learning. However, policy innovations were also identified, such as the Merdeka Belajar platform, enhanced teacher training, and multi-stakeholder collaboration. This study recommends a more inclusive and sustainable educational reform in the post-pandemic period. In addition to technical and infrastructural challenges, the social and psychological dimensions of education policies during the pandemic also require serious attention. The adjustment to distance learning models caused many students to experience stress, boredom, and reduced social interaction, which affected their character development and social skills. Teachers also faced high pressure due to the need to quickly adapt to new technologies and methods, often without adequate training. The pandemic experience offers valuable lessons for future education policy formulation. Governments need to design a flexible and resilient education system, prepared to face global disruptions. This includes the development of hybrid curricula, equitable digital learning, and data-driven contingency planning. Furthermore, collaboration between central and regional governments, as well as partnerships with the private sector and local communities, has proven to be crucial in supporting the continuity of education during times of crisis.

*Kebijakan
Pendidikan,
Pandemi COVID-19,
Pembelajaran Jarak
Jauh,
Kesenjangan Digital*

Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk menerapkan kebijakan darurat di sektor pendidikan. Studi ini menganalisis kebijakan pendidikan yang diterapkan selama masa pandemi, mengevaluasi efektivitasnya, serta menilai dampaknya terhadap proses pembelajaran dan kesenjangan pendidikan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ)

menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan digital, dan kualitas pembelajaran. Namun demikian, terdapat pula berbagai inovasi kebijakan yang diidentifikasi, seperti platform Merdeka Belajar, peningkatan pelatihan guru, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Studi ini merekomendasikan reformasi pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada periode pasca-pandemi. Selain tantangan teknis dan infrastruktur, dimensi sosial dan psikologis dari kebijakan pendidikan selama pandemi juga memerlukan perhatian serius. Penyesuaian terhadap model pembelajaran jarak jauh menyebabkan banyak siswa mengalami stres, kebosanan, dan berkurangnya interaksi sosial, yang berdampak pada perkembangan karakter dan keterampilan sosial mereka. Para guru juga menghadapi tekanan tinggi karena harus cepat beradaptasi dengan teknologi dan metode baru, seringkali tanpa pelatihan yang memadai. Pengalaman selama pandemi memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan pendidikan di masa depan. Pemerintah perlu merancang sistem pendidikan yang fleksibel dan tangguh, siap menghadapi disrupsi global. Ini mencakup pengembangan kurikulum hibrida, pembelajaran digital yang merata, dan perencanaan kontinjensi berbasis data. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas lokal, terbukti penting dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di masa krisis.

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mengakibatkan disrupsi besar dalam sistem pendidikan global. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya pencegahan penyebaran virus (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Perubahan ini membawa tantangan signifikan bagi siswa, guru, dan orang tua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan selama pandemi dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin keberlanjutan pendidikan. Sejak awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Berbagai sektor kehidupan terdampak secara signifikan, termasuk sektor pendidikan yang mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat. Sekolah-sekolah ditutup, kegiatan belajar-mengajar tatap muka dihentikan, dan jutaan siswa terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah. Situasi ini menuntut respons cepat dari pemerintah dan lembaga pendidikan di seluruh dunia untuk memastikan keberlanjutan pendidikan (UNESCO, 2020).

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mencatat bahwa pada puncak pandemi, lebih dari 1,6 miliar pelajar di lebih dari 190 negara terdampak oleh penutupan sekolah. Krisis ini memperparah ketimpangan akses pendidikan, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Pandemi bukan hanya memperlihatkan, tetapi juga memperlebar kesenjangan digital antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi (Reimers, 2020).

Di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan selama pandemi cukup kompleks. Ketimpangan akses internet, minimnya ketersediaan perangkat belajar, serta rendahnya kesiapan guru dan siswa dalam mengoperasikan teknologi pembelajaran menjadi hambatan utama (Siahaan, 2020). Di samping itu, peran orang tua sebagai pendamping belajar di rumah turut menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Situasi ini menuntut kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlangsungan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam konteks inilah, kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah, khususnya melalui Kemendikbudristek, memainkan peran krusial. Respons kebijakan seperti pemberlakuan pembelajaran jarak jauh (PJJ), penyediaan platform digital, bantuan kuota internet, serta fleksibilitas kurikulum menjadi upaya mitigatif untuk menjaga proses pendidikan tetap berjalan (kemendikbud, 2020). Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi bahan diskusi, terutama dalam hal dampaknya terhadap capaian belajar, pemerataan akses, dan kesiapan sistem pendidikan nasional dalam menghadapi krisis serupa di masa depan.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan disrupsi besar dalam sistem pendidikan global. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya pencegahan penyebaran virus (Kebudayaan, 2020). Perubahan ini membawa tantangan signifikan bagi siswa, guru, dan orang tua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan selama pandemi dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin keberlanjutan pendidikan. Selain aspek akademik, pembelajaran jarak jauh juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikososial siswa. Banyak siswa mengalami stres, kejenuhan, dan kehilangan motivasi belajar akibat keterbatasan interaksi sosial dan meningkatnya beban tugas daring (Yulia, 2020). Di sisi lain, guru juga mengalami tekanan psikologis akibat tuntutan untuk menguasai teknologi secara

cepat dan menyesuaikan metode pengajaran. Orang tua pun merasakan beban ganda sebagai pendamping belajar anak, terutama mereka yang bekerja penuh waktu atau memiliki keterbatasan dalam pemahaman materi.

Peran teknologi menjadi sangat krusial dalam menunjang pelaksanaan PJJ. Namun demikian, ketimpangan digital di Indonesia menjadi hambatan utama dalam menjamin akses yang merata. Laporan dari (Kominfo, 2021) menunjukkan bahwa sekitar 12.548 desa masih belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini berimplikasi pada kualitas pembelajaran yang timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan penyediaan bantuan kuota internet oleh pemerintah merupakan langkah positif, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan infrastruktur dan kemampuan teknis di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan selama pandemi. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek pelaksanaan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, efektivitas pembelajaran, dan dampak jangka panjang terhadap sistem pendidikan nasional. Refleksi atas pengalaman pandemi dapat menjadi fondasi dalam merancang kebijakan yang lebih tangguh dan responsif di masa depan, termasuk dalam menghadapi potensi krisis serupa yang mungkin terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan pendidikan selama pandemi COVID-19 secara mendalam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yakni dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber informasi yang relevan terkait topik penelitian. Data diperoleh dari dokumen kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga global seperti UNESCO, OECD, dan World Bank, serta sumber berita terpercaya yang memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan pendidikan di lapangan. Seleksi sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterkinian, kredibilitas, dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan melalui telaah kritis terhadap isi kebijakan serta interpretasi kontekstual terhadap pelaksanaan dan dampaknya di berbagai tingkat baik nasional maupun lokal. Untuk mendukung analisis, digunakan kerangka evaluasi kebijakan menurut (William,

2003), yang mencakup enam kriteria: *efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness)*. Setiap kebijakan dianalisis berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi kriteria tersebut dalam konteks pandemi. Analisis dilakukan secara manual tanpa bantuan perangkat lunak kualitatif seperti NVivo, karena fokus kajian lebih kepada telaah isi dan interpretasi normatif. Namun, struktur analisis tetap mengikuti prinsip sistematis dan logis sesuai standar penelitian kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kebijakan Pendidikan Selama Pandemi

Sejak diumumkannya pandemi COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi yang tidak memungkinkan tatap muka. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 dan diperkuat melalui berbagai program pendukung seperti penyediaan platform digital (Rumah Belajar, TVRI Belajar dari Rumah), relaksasi kurikulum, serta bantuan kuota internet. Kebijakan ini bersifat darurat namun cukup komprehensif, mencakup instrumen pembelajaran, dukungan teknis, hingga fleksibilitas asesmen. Di level kebijakan, respons Kemendikbudristek menunjukkan kesadaran terhadap kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan meski dalam situasi krisis. Namun, efektivitas pelaksanaannya di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas guru, dan kondisi sosial ekonomi peserta didik.

Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan strategis guna memastikan keberlanjutan pendidikan. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ditetapkan sebagai solusi utama dalam menjaga proses pembelajaran tanpa kontak fisik langsung. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 menjadi dasar hukum dari pelaksanaan PJJ, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah inisiatif seperti pengembangan platform pembelajaran digital (*Rumah Belajar*), tayangan edukatif di TVRI, fleksibilitas kurikulum, dan bantuan kuota internet. Kebijakan ini menunjukkan upaya adaptif pemerintah dalam merespons krisis pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain intervensi langsung, Kemendikbudristek juga mendorong pendekatan fleksibel bagi satuan pendidikan, termasuk pelibatan komunitas dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PJJ. Namun, bentuk kebijakan

yang bersifat top-down seringkali tidak selaras dengan kondisi di tingkat lokal. Banyak sekolah mengalami kebingungan dalam menginterpretasikan kebijakan karena minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis. Di sisi lain, guru dituntut untuk mengembangkan metode ajar secara mandiri, tanpa pelatihan yang memadai. Hal ini menyebabkan kebijakan yang pada dasarnya baik, menjadi tidak optimal dalam implementasinya.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun PJJ diadopsi sebagai kebijakan nasional, kesenjangan digital menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Data dari Kementerian Kominfo (2021) menunjukkan ribuan desa masih belum terjangkau jaringan internet yang stabil. Keterbatasan perangkat seperti laptop dan smartphone juga menjadi kendala bagi banyak siswa, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi persoalan. Banyak guru belum memiliki keterampilan pedagogik digital yang memadai untuk menyampaikan materi secara daring. Orang tua pun, terutama yang berlatar belakang pendidikan rendah, merasa kesulitan mendampingi anak belajar di rumah (Siahaan, 2020). Di sisi lain, siswa mengalami kejenuhan, stres, dan penurunan motivasi karena berkurangnya interaksi sosial dan meningkatnya beban tugas (Yulia, 2020).

Ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PJJ. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki jaringan internet yang stabil, bahkan ada yang sama sekali belum terjangkau. Di daerah-daerah tersebut, siswa kesulitan mengikuti pembelajaran daring dan akhirnya tertinggal dibandingkan siswa dari daerah urban. Selain itu, keterbatasan kepemilikan perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone juga menjadi kendala besar. Tidak sedikit keluarga yang harus berbagi satu perangkat di antara beberapa anak, atau bahkan tidak memiliki perangkat sama sekali. Tantangan lain datang dari sisi kesiapan aktor pendidikan, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Banyak guru mengaku tidak siap dengan peralihan metode mengajar secara daring karena belum terbiasa menggunakan teknologi pendidikan. Sementara itu, siswa mengalami kejenuhan, kurang fokus, dan stres akibat kurangnya interaksi sosial serta beban tugas daring yang meningkat. Orang tua, terutama mereka yang bekerja penuh waktu atau memiliki latar belakang pendidikan rendah, merasa kesulitan mendampingi proses belajar anak di rumah. Hal

ini menciptakan beban ganda dan memperdalam kesenjangan hasil belajar di masyarakat.

Secara umum berikut ini adalah tantangan dalam pembelajaran di era pandemic:

- **Keterbatasan Akses Teknologi**

Tidak semua siswa memiliki perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone. Banyak wilayah, terutama di daerah terpencil, mengalami keterbatasan akses internet atau sinyal yang tidak stabil.

- **Kesenjangan Digital**

Siswa dari keluarga kurang mampu tidak bisa mengakses pembelajaran daring dengan optimal karena keterbatasan fasilitas dan biaya kuota internet. Ketimpangan antar sekolah juga terjadi, di mana sekolah di perkotaan lebih siap dengan pembelajaran daring dibandingkan sekolah di pedesaan.

- **Kurangnya Keterampilan Digital Guru dan Siswa**

Tidak semua guru terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Siswa pun perlu waktu untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran baru berbasis teknologi.

- **Minimnya Interaksi Sosial**

Belajar dari rumah membuat siswa kehilangan kesempatan berinteraksi langsung dengan teman dan guru, yang berpengaruh pada perkembangan sosial dan emosional mereka.

- **Stres dan Kejenuhan**

Proses belajar daring yang monoton, beban tugas yang tinggi, dan kurangnya variasi pembelajaran dapat menyebabkan siswa mengalami stres dan kejenuhan. Guru juga mengalami kelelahan karena harus menyiapkan materi digital dan mengelola kelas virtual.

- **Evaluasi Pembelajaran yang Kurang Optimal**

Penilaian hasil belajar sulit dilakukan secara adil dan objektif karena keterbatasan pemantauan langsung. Risiko kecurangan akademik meningkat saat ujian dilakukan secara daring.

- **Dukungan Orang Tua yang Terbatas**

Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena keterbatasan waktu, pemahaman materi, atau pekerjaan yang padat.

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Model Dunn

Untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan selama pandemi, digunakan kerangka Model Evaluasi Kebijakan menurut (William, 2003) yang meliputi enam indikator utama:

- **Efektivitas:** Kebijakan PJJ secara umum berhasil menjaga proses belajar tetap berjalan, tetapi belum efektif meningkatkan capaian belajar secara merata. Penelitian OECD (2021) mengindikasikan adanya penurunan literasi dan numerasi terutama pada siswa dari kelompok kurang mampu.
- **Efisiensi:** Program bantuan kuota dan platform digital menunjukkan upaya efisiensi anggaran, namun belum tersedia data evaluatif yang menunjukkan rasio biaya terhadap manfaat secara jelas, terutama dalam konteks capaian hasil belajar.
- **Kecukupan:** Kebijakan ini belum cukup menjawab kebutuhan seluruh kelompok, terutama siswa berkebutuhan khusus dan mereka yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Aspek dukungan psikososial juga masih kurang diperhatikan.
- **Pemerataan (Equity):** Implementasi PJJ justru memperlebar ketimpangan pendidikan antarwilayah dan antar kelas sosial. Siswa dari kota besar dan keluarga mampu lebih mudah beradaptasi dibanding mereka yang tinggal di pedesaan.
- **Responsivitas:** Pemerintah menunjukkan respons cepat di awal pandemi, namun kurang tanggap dalam menyesuaikan kebijakan untuk menghadapi dampak jangka menengah, seperti kesenjangan belajar dan stres psikologis.
- **Ketepatan (Appropriateness):** PJJ merupakan kebijakan tepat dalam kondisi darurat, tetapi kebijakan transisi menuju pembelajaran hybrid/blended belum terkonsep secara matang hingga fase endemi.

Melalui kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan PJJ dapat dinilai dari berbagai aspek penting. Dalam hal efektivitas, kebijakan ini cukup berhasil mencegah putus sekolah dan menjaga agar proses belajar tetap berjalan. Namun, efektivitas dalam meningkatkan kualitas belajar dan hasil akademik belum tercapai secara merata. Berbagai studi menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa menurun, terutama pada siswa dari kelompok ekonomi rendah. Sementara itu, efisiensi kebijakan juga belum dapat diukur secara komprehensif karena terbatasnya data mengenai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai secara nasional.

Dari sisi kecukupan dan pemerataan (equity), kebijakan PJJ masih menghadapi tantangan besar. Dukungan terhadap siswa berkebutuhan khusus, anak-anak di daerah terpencil, serta keluarga prasejahtera masih jauh dari memadai. Bantuan kuota internet dan perangkat digital belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Akibatnya, kesenjangan pendidikan semakin melebar. Di sisi lain, meskipun responsivitas awal pemerintah cukup tinggi dengan peluncuran berbagai program pendukung, namun tanggapan terhadap isu-isu lanjutan seperti kelelahan mental siswa dan guru, serta kebutuhan pembelajaran yang bersifat inklusif, masih tergolong minim. Ketepatan (appropriateness) kebijakan juga mulai dipertanyakan seiring waktu, terutama karena lambatnya transisi ke pembelajaran campuran (blended learning) setelah kondisi mulai membaik.

Implikasi Kebijakan dan Refleksi Masa Depan

Pengalaman selama pandemi memberikan pelajaran penting bagi sistem pendidikan Indonesia. Pandemi telah menguji daya tahan (resilience) sistem pendidikan sekaligus menyoroti kelemahan-kelemahan struktural yang selama ini tersembunyi. Dalam konteks ini, penguatan infrastruktur digital pendidikan, peningkatan kapasitas pendidik, dan pembangunan sistem monitoring kebijakan yang kuat menjadi kebutuhan mendesak. Lebih jauh, pandemi menjadi momentum untuk mendorong reformasi pendidikan menuju model yang lebih fleksibel, inklusif, dan berbasis teknologi. Kebijakan pendidikan ke depan perlu mengadopsi prinsip *equity-driven*, yakni memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh mereka yang sudah siap, tetapi juga menjangkau kelompok rentan dan marginal.

Pengalaman selama pandemi memberikan banyak pelajaran penting bagi pengambil kebijakan di sektor pendidikan. Salah satu refleksi utama adalah pentingnya membangun sistem pendidikan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan, termasuk situasi darurat. Ke depan, pemerintah perlu melakukan investasi serius dalam infrastruktur digital, seperti memperluas akses internet di daerah terpencil dan menyediakan perangkat belajar yang terjangkau. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran digital harus dijadikan prioritas utama. Selain aspek teknis, reformasi kebijakan pendidikan juga perlu mencakup dimensi sosial dan psikologis. Pemerintah dan sekolah harus mempertimbangkan kesejahteraan mental siswa dan tenaga pendidik dalam merancang program pembelajaran. Penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah,

sekolah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Krisis pandemi adalah momentum untuk mengevaluasi ulang arah pendidikan nasional, agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, baik yang bersifat krisis maupun transformasi jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memunculkan tantangan besar sekaligus membuka peluang bagi reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan oleh Kemendikbudristek merupakan langkah darurat yang penting untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan di tengah situasi krisis. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai kendala serius, seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya kesiapan sumber daya manusia, serta ketimpangan sosial dan geografis yang memperburuk kesenjangan pendidikan. Berdasarkan evaluasi menggunakan model kebijakan Dunn, kebijakan PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif dan merata dalam pelaksanaannya. Meskipun terdapat inisiatif yang responsif seperti bantuan kuota dan fleksibilitas kurikulum, implementasi di lapangan masih terbentur oleh masalah infrastruktur dan ketidaksiapan aktor pendidikan. Kebijakan ini juga belum cukup menjangkau kelompok rentan, sehingga memperlebar jurang ketidaksetaraan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi jangka panjang untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Selain menunjukkan lemahnya kesiapan sistem pendidikan dalam menghadapi krisis, pandemi ini juga memperlihatkan pentingnya keberadaan kebijakan pendidikan yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ketergantungan terhadap satu bentuk pembelajaran tanpa alternatif yang memadai membuktikan bahwa sistem pendidikan kita masih sangat terpusat dan belum fleksibel. Oleh karena itu, pembelajaran dari masa pandemi harus dijadikan titik tolak untuk membangun sistem yang lebih resilien, tidak hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari aspek kelembagaan, kurikulum, dan tata kelola pendidikan. Lebih jauh, krisis ini menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menghadirkan solusi yang lebih inklusif. Pandemi menjadi cermin bahwa pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari sistem sosial yang terintegrasi. Refleksi ini penting agar kebijakan pendidikan di

masa depan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjawab tantangan zaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- UNESCO. (2020). *COVID-19 Educational Disruption and Response*. Retrieved from <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- Basilaia, G., & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. *Pedagogical Research*, 5(4), em0060. <https://doi.org/10.29333/pr/7937>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19*. <https://www.kemdikbud.go.id/>
- Kompas. (2021, March 5). Pemerintah distribusikan bantuan kuota internet. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/>
- Nurfauziah, A. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di masa pandemi. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 5(1), 45–52.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The state of global education: 18 months into the pandemic*. OECD Publishing.
- Sari, D. P., & Prasetyo, R. A. (2021). Analisis dampak pelatihan guru dalam pembelajaran daring di masa pandemi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 23(2), 89–101.
- World Bank. (2020). *Remote learning during the global school closures: How countries are addressing the challenge*. <https://www.worldbank.org/>
- Kemendikbud. (2020). *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- OECD. (2021). *The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic*. OECD Publishing.
- Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). *A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020*. OECD Publishing.
- Siahaan, M. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(3), 1–4.
- Kominfo. (2021). *Statistik Akses Internet di Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Yulia, H. (2020). Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona Virus in

Indonesia. *ETERNAL (English Teaching Journal)*, 11(1), 48–56.

<https://doi.org/10.26877/eternal.v11i1.6068>.